

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membuka peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Konsekuensinya adalah akan berkurangnya peran pemerintah pusat dan bertambahnya peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat menyentuh kehidupan masyarakat, bahkan sering layanan yang merupakan produk pemerintah daerah tersebut menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 telah direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara umum, aktivitas pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui bidang pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, dan pengelolaan keuangan yang menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penerapan kedua UU tersebut telah merubah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dari *vertical accountability* (pertanggungjawaban kepada pusat) menjadi *horizontal accountability* (pertanggungjawaban kepada

Pengendalian akuntansi dapat meningkatkan perencanaan dan kontrol aktivitas organisasi (Miah dan Mia, 1996) dalam Irfansyah (2003). Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan probabilitas keberhasilan rencana tertentu dan memilih alternatif terbaik dari setiap kasus, sehingga bisa meningkatkan kinerja (Miah dan Mia, 1996 dalam Irfansyah 2003); Andriani (2001). Peneliti dahulu yang mendukung hasil penelitian tersebut antara lain Miah dan Goyal (1990); Martin (1994); Macintosh (1994); Cushing dan Romey (1994) dalam Irfansyah (2003).

Dalam memperbaiki kinerja manajerial, aspek sumber daya manusia menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan dampak interaksinya terhadap pelayanan masyarakat, sehingga faktor yang mempengaruhi individu dalam organisasi merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan strategi organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Kantor dinas dalam menjalankan aktifitasnya mendasar pada prinsip efisien, efektif dan ekonomis dalam meningkatkan kinerjanya.

Siegel dan Marconi (1989) dalam bukunya *Behavioral Accounting*, yang dikutip dari Rahman (2002), menyatakan bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan variabel *cognitive* untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Variabel personalitas mengacu pada sikap dan keyakinan individual yang diwujudkan dalam karakteristik personalitas, sedangkan variabel *cognitive* mengacu pada cara atau metode dimana individu menerima

menyimpan, memproses dan mentransformasikan informasi ke dalam tindakannya.

Zammuto dan Bedeian (1991) dalam Irfansyah (2003), menyatakan bahwa perubahan organisasi berpengaruh terhadap perilaku individu di organisasi dalam menyikapi perubahan tersebut (*resistence to change*). Organisasi pemerintahan mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu birokratis, hirarki dan kaku. Sifat organisasi tersebut membuat karakteristik individu dalam organisasi pemerintahan cenderung mempercayai bahwa nasib mereka dikendalikan oleh keberuntungan atau kesempatan, dan mengharuskan mereka taat aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan, sistem peraturan dan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur situasi kondisi dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman (Mardiasmo, 2000)

Dalam penelitian Brownell (1982); Frucot dan Shearon (1991) dalam Irfansyah (2003), penggunaan variabel *locus of control* telah diteliti dalam kaitannya dengan salah satu alat sistem pengendalian manajemen. Hasilnya menunjukkan bahwa ada efek positif antara individu yang memiliki *locus of control* internal dengan kinerja manajerial.

Rahman (2002), menyatakan bahwa *Locus of Control* tidak dapat berfungsi sebagai pemoderasi dalam hubungan antara desentralisasi dalam pengambilan keputusan dengan pencapaian kinerja unit bisnis, tetapi dapat memoderasi hubungan antara penggunaan sistem pengendalian akuntansi dengan pencapaian kinerja unit bisnis. Irfansyah (2003), menyatakan bahwa

*Locus of Control* tidak dapat berfungsi sebagai variabel pemoderasi baik

terhadap hubungan antara desentralisasi dengan kinerja pimpinan dinas, maupun terhadap hubungan antara sistem pengendalian akuntansi dengan kinerja pimpinan dinas. Dalam penelitian ini menggunakan, pendekatan kontijensi akan diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan hubungan kedua variabel yang mana kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh sifat individu seperti *locus of control* (Brownell, 1981, 1982a; dalam Riyadi, 2000). Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Lucyanda (2001), variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan *Locus of Control* Sebagai Variabel Pemoderasi : Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah sistem pengendalian akuntansi akan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial ?
2. Apakah variabel *locus of control* akan berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan antara sistem pengendalian akuntansi terhadap peningkatan kinerja manajerial ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial.
2. Memberikan bukti empiris bahwa *locus of control* berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan sistem pengendalian akuntansi terhadap peningkatan kinerja manajerial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Menyediakan informasi yang kemungkinan diperlukan untuk penelitian bidang organisasi pemerintah pada masa yang akan datang.
2. Menjadi masukan bagi praktisi dan para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan strategi pencapaian